



Belanja Pegawai Pemprov Lampau Batas 30%

Belanja Pegawai Pemprov Lampau Batas 30%

MAKASSAR, UPEKS-- Belanja pegawai lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel disebut telah melampaui batas maksimal 30%. Porsi belanja pegawai Pemprov dalam struktur belanja RAPBD 2025 mencapai 42%.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman mengungkapkan, idealnya belanja pegawai maksimal 30%. Ketentuan tersebut sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

"Belanja pegawai kita itu angkanya tidak (boleh) melewati 30% menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Itu belanja pegawai maksimal 30%," ungkapnya, saat memimpin Rapat Penyesuaian Program Kegiatan Tahun Anggaran 2025 bersama BKD Sulsel, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel dan Bappelitbangda Sulsel,

di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (2/10/2024).

Jufri menjelaskan, kondisi belanja pegawai dalam struktur belanja RAPBD 2025 yang masih berkisar 42% lebih, terjadi akibat belanja daerah yang mengalami penurunan di tahun 2025. Dimana dari sebelumnya sekira Rp10 triliun lebih menjadi Rp9 triliun lebih. Selain itu, yang membuat belanja pegawai cukup besar karena banyaknya perpindahan PNS yang masuk ke wilayah kerja Pemprov Sulsel.

"Karena kalau pegawai pindah itu gajinya tidak ikut, jadi kita masukkan menjadi tanggungan kita. Kemudian, jumlah tenaga PPPK, ASN, dan honor kita cukup besar. Karena itu, kita sepakat dengan Kepala BKD, untuk sementara tidak menerima pegawai pindah masuk ke Pemprov Sulsel. Kecuali kalau tenaga itu sangat kita butuhkan atau ada petunjuk lain dari pimpinan," tegasnya.

Melihat kondisi belanja pe-

gawai yang melebihi batas 30%, kata Jufri, maka konsekuensinya tentu memengaruhi besaran nilai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga tahun anggaran 2027 atau selama masa berlaku UU Nomor 1 Tahun 2022. Dengan begitu, disepakati untuk lebih ketat memegang aturan undang-undang itu, agar belanja pegawai bisa ditekan di angka maksimal 30%.

"Nah, bagaimana kalau keadaannya masih tetap di atas 30%? Tentu yang jadi korban nanti adalah pengurangan besaran TPP. Jadi teman-teman ini kita minta berpikir mau ketat memegang aturan sekarang, agar supaya TPP tidak terganggu di tahun 2027," pungkasnya.

Kesepakatan lainnya, lanjut Jufri, penerimaan tenaga PPPK untuk tahun 2024 yang ada sekarang, nantinya akan mengambil porsi PPPK kategori paruh waktu lebih besar daripada tenaga penuh waktu untuk menekan beban anggaran. (eky/rif)

BELANJA PEGAWAI PEMPROV SULSEL:

• Belanja pegawai lingkup Pemprov Sulsel melampaui batas maksimal 30% porsinya dalam struktur belanja RAPBD 2025 capai 42%.

• Idealnya belanja pegawai maksimal 30% sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

• Hal ini terjadi akibat belanja daerah mengalami penurunan di tahun 2025. Dari sebelumnya Rp10 triliun lebih menjadi Rp9 triliun lebih.

• Belanja pegawai lampau batas 30% karena banyak PNS yang pindah masuk ke wilayah kerja Pemprov Sulsel.

• Kondisi ini akan memengaruhi besaran nilai TPP hingga tahun anggaran 2027.